



ANALISIS TEORI MODERNITAS TERHADAP DAMPAK TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI IBU KOTA NUSANTARA

Chubab ‘Ainul Yaqin Al Ghifari ¹, Muhammad Rafi Kurniawan ²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Email: chubab.ainulyaqin@gmail.coim, lamuhammadrafi1902@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan, peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya dan sering kali disebut sebagai pertumbuhan. Salah satu pembangunan nasional strategis yang kini dijalankan pemerintah saat ini adalah pembangunan IKN. Yang mana ibu kota negara Indonesia yang sebelumnya berada di Jakarta akan dipindahkan ke kawasan Kalimantan Timur. Meskipun pembangunan ini sangat strategis dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan menguatkan perekonomian Indonesia, terdapat risiko lain yang mengiringi kebijakan ini. Sehingga perlu adanya persiapan yang lebih matang untuk meminimalkan segala risiko yang kemungkinan dihadapi kedepannya. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji risiko yang kemungkinan terjadi, terutama yang dialami oleh masyarakat lokal di IKN. Pada kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kepustakaan (library research) dan menganalisisnya menggunakan teori Modernitas. Disini penulis memanfaatkan pemaparan, penemuan dan penelitian terdahulu yang masih dalam . Berdasarkan temuan terdahulu

Sejarah Artikel

Submitted: 7 Juni 2024

Accepted: 12 Juni 2024

Published: 13 Juli 2024

Kata Kunci

Sosiologi Pembangunan, IKN, Risiko

Pendahuluan

Di pertengahan tahun 2019 isu pemindahan Ibu Kota Negara menjadi isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Ibu Kota Negara Indonesia yang awalnya berada di kawasan DKI Jakarta akan dipindahkan ke wilayah kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sehingga dalam proses ini akan menciptakan pembentukan wilayah administratif baru dengan nama Nusantara yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Proses pemindahan ini akan ditargetkan selesai pada tahun 2045, yang mana pembangunan akan dibagi dalam beberapa tahap pengerjaan. Urgensi dilakukannya perpindahan Ibu Kota Negara ini diantaranya adalah mengurangi beban Jakarta, mendorong transformasi perekonomian, pemerataan pembangunan dan upaya pembangunan keberlanjutan.

Sebenarnya perencanaan pemindahan ibu kota negara merupakan bukan isu yang baru. Isu pemindahan ibu kota pernah muncul di era Hindia Belanda. Kemudian di masa kepemimpinan presiden Soekarno, beliau pernah mengusulkan pemindahan Ibu Kota baru di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di era kepemimpinan presiden Soeharto wacana pemindahan ibu kota ke Jawa Barat sempat mencuat. Dan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota negara kembali diangkat dan kini dalam proses pembangunan. Akan tetapi kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo ini tentunya menuai berbagai tanggapan pro dan kontra. Dimana potensi sumber daya alam yang masih belum sepenuhnya dikelola dapat di kembangkan guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara. Disisi lain terdapat risiko yang ditimbulkan akibat pemindahan ibu kota. Terdapat potensi kerusakan ekosistem alam karena pembukaan lahan baru serta tersingkirnya masyarakat lokal oleh masyarakat pendatang.



Pada dasarnya pembangunan adalah upaya untuk melakukan perubahan lebih baik, peningkatan dan acap kali disebut sebagai pertumbuhan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat¹. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan transformasi ekonomi, sosial dan budaya menuju arah strategis melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Namun dalam memulai pembangunan infrastruktur pertimbangan yang matang sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi. Tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan setelah pelaksanaan².

Dalam melakukan proses perencanaan pembangunan IKN pasti memerlukan pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu yang vital dalam merealisasikan perencanaan pembangunan yang disiapkan. Bahkan kegagalan pembangunan suatu proyek infrastruktur juga seringkali disebabkan oleh pembiayaannya yang tidak memadai³. Dikutip dari website DPR RI (2023) IKN sendiri memiliki sumber pendanaan dari beberapa pihak, mulai dari APBN, pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta⁴. Selain itu pemerintah mengupayakan adanya sumber dana dari investasi luar yang masuk ke IKN. Sehingga terdapat kemungkinan adanya perekonomian baru melalui para investor dan tentunya akan memberikan dampak terhadap IKN.

Dengan berbagai isu persoalan yang menghampiri proses pembangunan dan pindahnya Ibu Kota Negara, pemerintah perlu mempersiapkan risiko yang mungkin akan terjadi. Terutama masyarakat lokal yang akan mengalami transformasi sosial-budaya dan ekonomi adanya pembangunan IKN, keberadaan pendatang dan potensi kendali investor dipereekonomian kedepannya. Pada kajian ini penulis menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kepustakaan (*library research*). Yang mana karena peneliti memanfaatkan informasi yang tersebar di internet untuk mendapatkan data pemaparan, penemuan serta penelitian yang masih didalam koridor pustaka ilmiah sesuai dengan tema dan kajian⁵. Dalam kajian ini penulis akan berfokus pada dampak transformasi sosial-budaya dan ekonomi dari pembangunan IKN yang dihadapi komunitas lokal. Selain itu penulis juga akan menganalisa tahapan yang dialami masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Walt Rostow.

Kajian Teori Teori Modernisasi

Dalam teori modernisasi, modernisasi diasumsikan sebagai proses sistematis, transformasi, dan terus-menerus. Proses sistematis ini melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi⁶. Secara sederhana teori ini berpendapat bahwa pembangunan dapat dicapai melalui

¹ Digdowiseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). hlm. 8

² Pratama, Kristianus Jimmy. (2022). "TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA". Jakarta: Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022. Hlm 48

³ Ibid. Hlm 48.

⁴ DPR RI. (2023). "Pembangunan IKN dari APBN Tembus 16,1 Persen Total Anggaran, Banggar: Pendanaan Harus Berimbang". [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48165/t/Pembangunan%20IKN%20dari%20APBN%20Tembus%2016,1%20Perse%20n%20Total%20Anggaran,%20Banggar:%20Pendanaan%20Harus%20Berimbang#:~:text=Dalam%20keterangan%20terulis%20yang%20diterima,BMN\)%2C%20serta%20investasi%20swasta.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48165/t/Pembangunan%20IKN%20dari%20APBN%20Tembus%2016,1%20Perse%20n%20Total%20Anggaran,%20Banggar:%20Pendanaan%20Harus%20Berimbang#:~:text=Dalam%20keterangan%20terulis%20yang%20diterima,BMN)%2C%20serta%20investasi%20swasta.)

⁵ Darmalaksana, W. (2020). "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan". Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 5.

⁶ Jamaludin, Adon Nasrullah.(2016).Sosiologi Pembangunan. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. Hlm 41.



adopsi nilai-nilai, institusi, dan teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju. Sehingga proses pembangunan dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi, yang mana institusi atau pemerintah memiliki power dalam mengarahkan pembangunan.

Walt Rostow bahwa pembangunan ekonomi terjadi melalui lima tahap utama⁷:

- 1) masyarakat tradisional,
- 2) prasyarat untuk tinggal landas,
- 3) tinggal landas,
- 4) menuju kematangan, dan
- 5) konsumsi massal yang tinggi.

I. Hasil dan Pembahasan

Terdapat beberapa risiko yang ada dalam proses menjalankan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Risiko tersebut menjadi tantangan tersendiri yang perlu ditangani guna menunjang kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Sehingga perlu adanya kesiapan dalam transformasi sosial-budaya dan ekonomi diantaranya yaitu:

- a) Keterlibatan partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara⁸. Dimana masyarakat lokal yang terdampak pembangunan IKN perlu diberikan ruang untuk memberikan menyampaikan aspirasi. Dalam kasus ini pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas dan siap menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang terdampak. Terlebih kawasan sekitar IKN kelak akan menjadi kawasan penunjang IKN yang memiliki peran dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dan menciptakan keterbukaan aspirasi masyarakat.
- b) Perlindungan terhadap masyarakat lokal. Dampak dari pembangunan ibu kota negara baru yang berada di Kalimantan Timur membuat beberapa komunitas adat sebagai masyarakat lokal terdampak. Gabungan Masyarakat Adat atau lokal di kawasan Nusantara memperkirakan 200 ribu lebih, diantaranya yaitu 19 komunitas adat di Penajam Paser Utara dan 2 kelompok adat di Kutai Kartanegara menjadi korban pembangunan IKN⁹. Perlu adanya ketebukaan pihak pemerintah dalam memberikan kepastian dan jaminan kesejahteraan masyarakat lokal. Dibeberapa kasus masyarakat lokal menyampaikan bahwa ganti rugi yang diterima akibat terdampak pembangunan IKN tidak sebanding¹⁰. Hal ini karena potensi Ibu Kota baru membuat tanah di kawasan Kalimantan Timur menjadi naik. Selain itu masyarakat lokal yang terdampak tidak diberikan pilihan untuk mendapatkan tempat relokasi hanya ganti rugi.
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan IKN dan sekitarnya. Masyarakat penduduk lokal dituntut agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan konsep Ibu Kota Nusantara yang berkonsep smart city dan forest city. Sehingga perlu adanya bimbingan dalam memberikan literasi digital, kemampuan untuk melihat, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara cerdas, bijak dan tepat sesuai kemanfaatannya.

⁷ Ibid. Hlm 51.

⁸ Kemenko PMK. (2022). Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>

⁹ Kompas.com. (2022). Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan “hapus dosa” Korporasi. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>

¹⁰ BBC News Indonesia. (2024). Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – ‘Kami tidak akan melihat kota itu’. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lw2dxo>



- d) Urbanisasi masal yang tak terkendali. Meskipun Jakarta nantinya akan tetap menjadi pusat perekonomian negara Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pertumbuhan perekonomian yang ada di Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya nanti menjadi target baru atau kedua dalam perekonomian. Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi akan meningkat seiring berjalannya waktu, dan di tahun 2045 diperkirakan menyentuh 10-11 juta jiwa di Kalimantan Timur¹¹. Sehingga perlu adanya kesiapan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, mulai dari ketimpangan sosial, konflik antar penduduk lokal dan pendatang, meningkatnya kemiskinan, permukiman kumuh, kejahatan dan kerusakan lingkungan.
- e) Perubahan budaya. Berbaurnya penduduk lokal dan penduduk pendatang tidak menutup kemungkinan berdampak pada budaya yang ada di Kalimantan Timur. Risiko dan tantangan baru yang diciptakan memungkinkan terjadinya akulturasi dan bahkan hingga asimilasi budaya. Risiko ini berpotensi menciptakan budaya baru ataupun menggabungkan unsur budaya yang dimiliki masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Bahkan hal terburuknya jika masyarakat lokal gagal mempertahankan budaya yang dimilikinya akibat tergerusnya budaya asli di wilayah sana. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah kebijakan ataupun hukum yang mengatur dalam menjaga kelestarian budaya asli yang ada di Kalimantan Timur.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan nasib negara dikemudian hari dengan berbagai potensi dan risiko yang ada. Begitu juga dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki potensi untuk memberikan ancaman terjadinya marginalisasi dan pengecualian terhadap masyarakat lokal.

"Indigenous land conflicts between the state, indigenous people, and investors often escalate into criminalising indigenous people who try to defend their territories or to make a living from their occupied ancestor land." (Hery & Dien (2023:95) ¹²

Proses kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi ketika akses masyarakat adat kepada sumber daya yang ada di tanah mereka dibatasi. Masyarakat yang awalnya menggantungkan diri kepada sumber daya alam yang tersedia di hutan adat misalnya, tidak dapat mengambil sumber daya tersebut apabila pemerintah melakukan pembukaan lahan hutan. Masyarakat awam yang masih mengambil material langsung dari alam seperti kayu dapat dijatuhi hukuman tindak pidana. Dengan kata lain, proses pembangunan dan pembukaan lahan oleh pemerintah dapat menjadi pemicu konflik dengan masyarakat lokal hingga merenggut apa yang semulanya menjadi hak mereka.

Selain itu dampak transformasi ekonomi yang paling terasa adalah pekerjaan asli dari masyarakat lokal yang tergantikan. Beberapa diantara mereka yang kehilangan ladang untuk berkebun harus bertahan dengan mencari pekerjaan baru. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang terbatas dan tidak dapat merangkul semua masyarakat lokal yang terdampak. Disisi lain lapangan pekerjaan baru mungkin akan tercipta seiring berdirinya perusahaan atau industri yang telah menanamkan saham dengan berinvestasi

¹¹ Kompas.com. (2020). Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel_gpr

¹² Prasetyo, Hery & Rosa, Dien Vidia. (2023). "The Undeclared Defeat: Indigenous Identity Politics in the Indonesian Law on Advancement of Culture". Jember: Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 7 Issue. Hlm 95. doi: 10.19184/jseahr.v7i1.39200



dipembangunan IKN. Datangnya masyarakat pendatang dan investor menimbulkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dibaningkan masyarakat lokal ataupun pendatang, investor memiliki keistimewaan yang lebih. Hal ini tampak pada perlindungan hukum sesuai dengan kesepakatan antara investor dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Masyarakat adat sebagai masyarakat lokal yang asli mendiami kawasan tersebut berpotensi menjadi buruh pekerja. Terlebih dengan kehadiran masyarakat pendatang persaingan dalam mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi tidak terelakkan. Begitu juga dengan dominasi investor menguasai sektor ekonomi juga tidak dapat dihindarkan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan dari pembahasan, pemerintah sebagai aktor memiliki memiliki kendali penuh dalam mengarahkan pembangunan. Berdasarkan urgensinya pemindahan IKN, pemerintah menjalankan pembangunan memiliki tujuan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dalam proses menjalankan kebijakan melakukan pembangunan masyarakat kawasan IKN dan sekitarnya mengalami beberapa proses tahap pembangunan. Diantaranya yaitu: 1) tahap masyarakat tradisional, dimana masyarakat lokal dihadapkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sedang ditingkatkan melalui beberapa kebijakan pemerintah. Terlebih kawasan wilayah IKN merupakan kawasan penunjang Ibu Kota dimasa depan. 2) prasyarat untuk tinggal landas, dimana masyarakat mendapatkan dorongan eksternal untuk ikut campur berpartisipasi dalam mengembangkan dan membangun IKN. 3) tinggal landas, berlangsungnya investasi yang masuk ke IKN membuka jalan perekonomian bertumbuh kembang dengan adanya industri yang baru dan mendorong proses modernisasi. Ketiga tahap ini sedang dilalui dalam proses pembangunan IKN. Namun disisi lain berbagai risiko dan tantangan masih banyak untuk dilewati demi mensejahterakan masyarakat sebagai kelas bawah bukan hanya kelas atas. Pemerintah perlu lebih memberikan kepastian terhadap masyarakat adat atau lokal, pendatang dan juga investor agar seimbang tanpa merugikan salah satu pihak dalam ambisi kebijakan IKN.

Daftar Pustaka

- Digdowiseiso, Kumba. (2019). *“Teori Pembangunan”*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Pratama, Kristianus Jimy. (2022). *“TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA”*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022.
- DPR RI. (2023). *“Pembangunan IKN dari APBN Tembus 16,1 Persen Total Anggaran, Banggar: Pendanaan Harus Berimbang”*. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48165/t/Pembangunan%20IKN%20dari%20APBN%20Tembus%2016,1%20Persen%20Total%20Anggaran,%20Banggar:%20Pendanaan%20Harus%20Berimbang#:~:text=Dalam%20keterangan%20tertulis%20yang%20diterima,BMN\)%2C%20serta%20investasi%20swasta.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48165/t/Pembangunan%20IKN%20dari%20APBN%20Tembus%2016,1%20Persen%20Total%20Anggaran,%20Banggar:%20Pendanaan%20Harus%20Berimbang#:~:text=Dalam%20keterangan%20tertulis%20yang%20diterima,BMN)%2C%20serta%20investasi%20swasta.)
- Darmalaksana, W. (2020). *“Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan”*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 5.



- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). *“Sosiologi Pembangunan”*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Kemenko PMK. (2022). *“Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara”*.
<https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-pelibatan-masyarakat-lokal-dalam-proses-pembangunan-ikn-nusantara>
- Kompas.com. (2022). *“Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan ‘hapus dosa’ Korporasi”*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>
- BBC News Indonesia. (2024). *“Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – ‘Kami tidak akan melihat kota itu’”*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo>
- Kompas.com. (2020). *“Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi”*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel_gpr
- Prasetyo, Hery & Rosa, Dien Vidia. (2023). *“The Undeclared Defeat: Indigenous Identity Politics in the Indonesian Law on Advancement of Culture”*. Jember: Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 7 Issue. doi: 10.19184/jseahr.v7i1.39200